

KERJASAMA INDONESIA – KOREA SELATAN DALAM BIDANG E-GOVERNMENT

Eka Purnamasari¹
Nim. 1302045101

Abstract

E-Government is a technology system developed by the government to facilitate people in getting access to government. The cooperation between the Republic of Indonesia with the Republic of Korea in terms of E-Government began in 2015-2018. The results of this research shows E-Government established by the Republic of Indonesia and the Republic of Korea in terms of E-Government has benefited Indonesia, and been implemented by the formation of E-Government Cooperation Center and upgrading E-Government in Indonesia. Aside from the Implementation, this cooperation also provides benefits such as the creation of good governance system and enhance Indonesia's quality of human resources.

Keywords: *Cooperation, E-Government, Indonesia, Korea.*

Pendahuluan

Di era globalisasi ini perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan komunikasi tumbuh dengan pesat. Internet merupakan suatu fenomena yang telah merubah sistem kehidupan di seluruh dunia, dimana semua kegiatan masyarakat tidak terlepas dari penggunaan internet. Kemajuan perkembangan internet telah mempengaruhi segala aktivitas manusia setiap waktunya, hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek seperti dunia bisnis, militer, pendidikan, pelayanan masyarakat dan lain-lain. Hingga kini jumlah pengguna internet terus bertambah dan tersebar keseluruh pelosok dunia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan internet saat ini telah memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan manusia. Suatu negara dapat dikatakan maju apabila dilihat dari tingkat penguasaan terhadap teknologi, dimana masyarakat dan pemerintahannya sadar akan perkembangan teknologi dan informasi digital.

Internet memiliki peran penting bagi suatu negara, dimana kehadiran teknologi dan informasi banyak memberikan kemudahan dalam sebuah sistem pemerintahan, dimana layanan digital dibutuhkan pemerintah guna mendukung keterbukaan (transparansi) antara pemerintah dan masyarakat umum, pelaksanaan pemerintah lebih efisien, dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat (Layanan Digital Dukung Transparansi dan Efisiensi). Sejauh ini penggunaan internet di berbagai negara tidak merata, khususnya di negara berkembang. Salah satu penyebabnya, yaitu

¹ Mahasiswa S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ekaterorita12@gmail.com

kurangnya kemampuan negara berkembang dalam menciptakan teknologi baru (Kemajuan Teknologi dan Pembangunan Ekonomi). Contoh negara yang sedang mengembangkan teknologinya ialah Indonesia.

Pemanfaatan teknologi di Indonesia dapat dikatakan belum maksimal, hal ini dibuktikan bahwa kemajuan teknologi di Indonesia masih rendah, adapun indikatornya adalah kurangnya kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi di sektor industri, sinergi kebijakan masih lemah, dan sedikitnya jumlah ilmuwan di Indonesia. Dalam instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 disebutkan pemerintahan elektronik adalah upaya terstruktur untuk mengembangkan pelayanan publik berbasis data internet secara efektif dan efisien. Dengan adanya pengembangan penyelenggaraan sistem pelayanan masyarakat berbasis data internet di instansi pemerintahan Indonesia diharapkan dapat memberikan pelayanan publik secara maksimal diseluruh wilayah Indonesia.

Namun demikian, masih banyak kendala yang dialami oleh pemerintah Indonesia, hal ini terkait berbagai macam masalah seperti pemerataan jaringan internet yang belum memadai, kemudian dinilai sangat penting karena pelayanan masyarakat berbasis data internet bergantung pada sistem jaringan internet. Selain itu masalah utama lainnya adalah kesiapan sumber daya manusianya, sejauh ini kesiapan sumber daya manusia di Indonesia masih belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari pengembangan *e-skills* di instansi-instansi pemerintahan. Kemudian agar dapat mengejar ketertinggalannya, maka Indonesia memperbaiki sistem pemerintahannya, salah satu upaya Indonesia dalam menangani hal tersebut ialah membentuk sistem *e-government*.

E-government adalah sistem teknologi dan informasi yang dikembangkan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses informasi dan layanan pemerintah. Pemanfaatan teknologi *e-government* ini juga merupakan bentuk dukungan terhadap aktivitas pemerintah. Adapun bagian-bagian sistem *e-government* adalah sebagai berikut:

1. *Government to Citizen* adalah aplikasi dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portopolio teknologi dengan tujuan untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakatnya, dengan penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat, memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Contohnya seperti layanan imigrasi, layanan kesehatan, dan lain-lain.
2. *Government to Business* adalah transaksi-transaksi elektronik dimana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah. Mengarah kepada pemasaran produk dan jasa ke pemerintah untuk membantu pemerintah menjadi lebih efisien melalui peningkatan proses bisnis dan manajemen data elektronik. Contohnya seperti pajak perseroan, pendaftaran perusahaan, dan lain-lain.
3. *Government to Government* adalah komunikasi dan pertukaran informasi berbasis data internet antar departemen atau lembaga pemerintahan melalui basis data terintegrasi. Contohnya seperti *blogging* untuk kalangan legislatif, pertukaran informasi tenaga kerja asing, dan lain-lain.

Pemerataan pembangunan yang ditujukan untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal di seluruh wilayah Indonesia tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian sistem birokrasi Indonesia pun tidak terintegrasi baik dengan pemerintah pusat. Di Indonesia sendiri masih terjadi kesenjangan digital baik secara wilayah maupun masyarakatnya. Dengan masih adanya kesenjangan digital, penyebaran informasi dan komunikasi dari pusat pemerintahan keseluruhan penjurur negeri tentu tidak dapat merata. Di daerah-daerah yang sudah terjangkau akses internet, informasi dan komunikasinya dapat berjalan dengan baik dan sebaliknya. Contoh kesenjangan digital di Indonesia, dimana Pulau Jawa memiliki akses internet yang sangat mudah dan terus berkembang pesat, sementara di wilayah Indonesia bagian Timur akses internetnya masih lambat dan jauh tertinggal.

Berdasarkan data dari UNDP, Indonesia berada di peringkat 97 di dunia, sementara peringkat pertama diduduki oleh Korea Selatan (*E-Government* Indonesia Masih Tertinggal terdapat di m.cnnIndonesia.com/teknologi/20141110141025-192-10586/e-government_indonesia_masih_tertinggal). Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddi Chrisnandi, alasan memilih Korea Selatan dikarenakan *e-government*nya paling unggul di dunia dan ia menilai *e-government* negara itu memiliki reputasi yang baik dan memiliki tren positif (Menpan-RB: *E-Government* Korea Selatan Paling Bagus di Dunia. Maka dari itu Indonesia mengajak Korea Selatan untuk melakukan kerjasama di bidang *e-government*. Korea Selatan dinilai sukses dalam mengembangkan sistem *e-government*, dimana negara ini menempati peringkat pertama di dunia. Peningkatan ini dinilai berdasarkan tiga sub indeks, yaitu layanan berbasis data internet, telekomunikasi, dan sumber daya manusia (*EDGI*).

Pada tahun 2001, Korea Selatan mulai mengembangkan dan mengimplementasikan *e-government* untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, di tahun 2008-2012 pemerintah Korea Selatan mulai membangun target berikutnya, yaitu mengintegrasikan semua sistem *e-government* agar pelayanan publik terwujud (Kemajuan *E-Government* Pada Korea Selatan Serta Perbandingannya dengan Indonesia. Upaya Korea Selatan dalam mengembangkan *e-government* dinilai berhasil, hal ini dapat dilihat dari *best practice e-government*nya. Berikut contoh *best practice* dari *e-government* Korea Selatan, antara lain; *Government Intergrated Data Center (GIDC)*, *Comprehensive Tax System (PostNet)*, dan *Employment Portal (WORKNET)*.

Perbandingan kemajuan teknologinya dapat dilihat dari kemajuan perkembangan internet, contohnya Korea Selatan memiliki jaringan internet yang sudah merata hingga seluruh wilayahnya dengan kecepatan 117,49 *Mbps*, sedangkan di Indonesia penyebaran jaringan internet masih belum merata dan rata-rata kecepatan internetnya hanya 13,79 *Mbps*.

Kemajuan *e-government* di Korea Selatan didukung oleh infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai, selain itu peran pemerintahan Korea Selatan dinilai sukses dalam mengembangkan *e-government*nya. Sementara di Indonesia, banyak faktor penghambat dalam kemajuan *e-government*, seperti penggunaan pelayanan berbasis data internet yang rendah, infrastruktur dan telekomunikasi yang belum

memadai, sehingga kerjasama Indonesia dan Korea Selatan diharapkan dapat mengatasi permasalahan *e-government* di Indonesia.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Konsep Kerjasama Bilateral

Menurut Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani (2006:23) kerjasama internasional merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu sama lain. Dalam melakukan kerjasama ini dibutuhkan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan tersebut. Tujuannya ditentukan oleh masing-masing pihak yang terlibat didalamnya dan juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan negaranya. Kerjasama internasional ini dapat terbentuk karena kebutuhan internasional yang meliputi bidang ideologi, ekonomi, politik, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan.

Konsep kerjasama bilateral yang dilakukan antar negara menjadi hal yang sangat penting dalam studi hubungan internasional. Kerjasama bilateral merupakan hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara dalam berbagai aspek kehidupan guna tercapainya tujuan bersama. Kerjasama bilateral dapat berbentuk kerjasama diplomatik yang ditandai dengan hubungan erat antara lembaga-lembaga antar Negara (Didi Krisna, 18).

Kerjasama bilateral mampu mengatasi berbagai masalah suatu negara, termasuk kerjasama Indonesia dan Korea Selatan. Indonesia yang sedang mengembangkan negaranya perlu melakukan kerjasama dengan Korea Selatan dalam mengembangkan *e-governmentnya*. Kerjasama ini bertujuan untuk mengatasi pelayanan publik di Indonesia khususnya di bidang *e-government*. Pengembangan *e-government* dinilai penting karena sejauh ini *e-government* di Indonesia masih belum maksimal, dimana kerjasama ini berfokus pada peningkatan pelayanan publik dan membentuk pusat kerjasama *e-government*.

Keterlibatan Korea Selatan dianggap mampu mengatasi *e-government* di Indonesia yang masih belum maksimal sehingga terwujudnya sistem *good governance* (efektif, efisien dan transparan). Dengan demikian, kerjasama bilateral oleh kedua negara ini diharapkan dapat memberikan keuntungan bersama dan mempererat hubungan kedua negara tersebut.

Konsep E-Government

Budi Rianto dkk menyimpulkan bahwa *e-government* merupakan bentuk aplikasi pelaksanaan tugas dan tata laksana pemerintahan menggunakan teknologi telematika atau teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi *e-government* ini dioperasikan oleh Aparatur Sipil Negara dimana mekanisme ini dapat menciptakan layanan kepegawaian berbasis digital dengan memberikan peluang meningkatkan dan mengoptimalkan hubungan antar instansi pemerintah, hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat. Mekanis hubungan itu melalui pemanfaatan teknologi informasi yang merupakan kolaborasi atau penggabungan antara komputer dan sistem jaringan komunikasi.

Budi Rianto dkk mengatakan sedikitnya ada empat indikator keberhasilan *e-government*, yaitu :

1. Ketersediaan data dan informasi pada pusat data
2. Ketersediaan data dan informasi bagi kebutuhan promosi daerah
3. Ketersediaan aplikasi *e-government* pendukung pekerjaan kantor dan pelayanan publik
4. Ketersediaan aplikasi dialog publik dalam rangka meningkatkan komunikasi antar pemerintah dengan sektor swasta dan masyarakat melalui aplikasi *e-mail*, SMS, ataupun *teleconference*

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yang bertujuan untuk menjelaskan mengenai implementasi dan manfaat yang didapat Indonesia dalam kerjasama *e-government* dengan Korea Selatan. Data penelitian ini adalah data sekunder, yaitu diperoleh dari buku-buku, koran, internet, dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam pengumpulan data, teknik yang digunakan adalah berupa penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui telaah buku, majalah, tulisan ilmiah dan termasuk situs internet. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa isi (*content analysis*) dengan melalui pendekatan kualitatif yang menekankan pada akurasi kualitas data dengan menjelaskan dan menganalisis hubungan antara data, fakta, dan teori yang ada kemudian bisa ditarik kesimpulan.

Hasil Penelitian

Problematika E-Government di Indonesia

Pada saat ini telah banyak instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom berinisiatif mengembangkan pelayanan publik melalui jaringan komunikasi dan informasi. Mayoritas situs pemerintah dan pemerintah daerah otonom berada pada tingkat pertama (persiapan), dan hanya sebagian kecil yang telah mencapai tingkat kedua (pematangan). Sedangkan tingkat ketiga (pemanjangan) dan tingkat keempat (pemanfaatan) belum tercapai. Inisiatif tersebut di atas belum menunjukkan arah pembentukan *e-government* yang baik. Inefisiensi dalam administrasi pemerintah dapat ditemukan dengan keberadaan basis data nasional yang terpisah-pisah, seperti basis data kependudukan, pertanahan, kendaraan bermotor, dan pajak. Memiliki basis data terpisah berarti bahwa masyarakat harus melakukan registrasi rangkap, melalui proses kertas kerja yang panjang untuk berbagai perizinan dan membutuhkan beberapa kali kunjungan lembaga-lembaga pemerintah. Dalam sistem ini, pemerintah menyediakan berbagai layanan, meliputi penerbitan berbagai surat/izin, konsultasi, pemrosesan petisi masyarakat, pembayaran elektronik, dan penyebaran informasi pemerintah. Aparatur Negara juga harus dapat melayani rakyatnya dan siap melayani sebaik-baiknya. Saat ini banyak lembaga pemerintah yang menyatakan dirinya sudah mengaplikasikan *e-government* padahal pada kenyataannya lembaga-lembaga pemerintahan tersebut baru dalam tahap *webpresence*, masih belum terlihat adanya penerapan *e-government* yang benar-benar dijalankan secara mendalam.

Oleh karena itu banyak yang menyatakan bahwa pelaksanaan *e-government* belum optimal karena secara riil beberapa pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah masih

menggunakan cara-cara yang manual seperti proses pembuatan KTP, akta kelahiran, kartu keluarga, dan lain-lain.

Upaya Perbaikan E-Government di Indonesia

Kondisi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sendi pelayanan antara lain yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar penduduk, masih dirasakan belum seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat antara lain dari banyaknya pengaduan, keluhan masyarakat. Di lain pihak masyarakat sebagai unsur utama yang dilayani belum memberikan kontrol yang efektif untuk menjadi unsur pendorong dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh sebab itu, diperlukan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik melalui pembenahan yang menyeluruh meliputi aspek kelembagaan, kepegawaian (SDM), tata laksana dan akuntabilitas, sehingga diharapkan dapat menghasilkan pelayanan publik yang prima yaitu pelayanan yang cepat, tepat, murah, aman, berkeadilan dan akuntabel. Dalam hal aspek pengembangan SDM, perlu lebih banyak dilakukan pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai untuk dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Selain itu Indonesia telah membuat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan tujuan agar ada payung hukum yang melindasi bisnis proses dalam *e-government*.

Perkembangan E-Government di Korea Selatan

E-government yang dikembangkan oleh pemerintah Korea telah dinilai sebagai yang terbaik di dunia oleh PBB dan efektifitas *e-government* Korea juga diakui secara luas oleh komunitas internasional. Pada awalnya, *e-government* Korea Selatan memiliki tujuan untuk tahap awal yaitu mendigitalisasi semua prosedur penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan infrastruktur IT.

Untuk mewujudkannya pemerintah Korea Selatan memulai dengan membangun dasar komputerasi sistem administrasinya pada 1970, mengkomputerisasi semua *database* utama nasional pada 1980, dan membangun jaringan informasi dan komunikasi berkecepatan tinggi pada tahun 1990-an. Pada periode selanjutnya (2008-2012), pemerintah Korea Selatan mulai membangun target berikutnya, yaitu mengintegrasikan semua sistem *e-government* agar pelayanan publik terwujud. Dimulai pada tahun 2008, pemerintah menjalankan implementasi berbagai proyek yang berfokus pada koneksi dan integrasi yang mendukung penciptaan sistem informasi yang baik untuk mengintegrasikan layanan publik berorientasi masyarakat dan bisnis. Tahun 2014 upaya Korea Selatan mampu menempatkan *e-government* menjadi negara yang mempraktekkan *e-government* kelas dunia sehingga mampu menjadi yang terbaik.

Tahun 2017 ada beberapa faktor yang menopang keberhasilan *e-government* di Korea Selatan ini, yaitu pendekatan dalam melakukan manajemen perubahan yang didasarkan komitmen yang kokoh didukung oleh infrastruktur politik dan infrastruktur teknik, *e-government* sebagai proyek bersama yang dipimpin langsung oleh presiden sehingga mampu memadukan organisasi pemerintahan dengan sektor swasta termasuk sinergi perencanaan dan penganggaran melalui Kementerian Perencanaan dan Penganggaran, mengembangkan kesepakatan bersama (konsensus)

yang melibatkan: pemerintah, dunia usaha, media massa, masyarakat madani atau lembaga swadaya masyarakat dan lainnya sehingga menghasilkan dukungan luas dari publik.

Kerjasama Indonesia dan Korea Selatan di Bidang E-Government

Kerjasama ini merupakan tindak lanjut kedua negara yang sudah menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU)* kerjasama di bidang *e-government* dan reformasi birokrasi tahun 2015. Dalam *Workshop* yang bertema “*Smarter Strategy for Better Government*”, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi, seperti dikutip dari situs Kementerian PAN-RB, mengakui bahwa selama ini sistem IT masing-masing terpisah dan tersebar yang menciptakan “pulau sistem” tersendiri. Hal ini mengakibatkan belanja IT pada tahun 2013 sangat besar, yang mencapai nilai \$1,2 miliar atau setara Rp 14 triliun. Adapun Korea Selatan terbukti memiliki pengalaman yang bagus dalam implementasi teknologi informasi dan komunikasi di pemerintahan. Korea Selatan secara berturut-turut pada tahun 2010, 2012, dan 2014 selalu berada di peringkat nomor satu negara di dunia dalam hal pengembangan *e-government* dan partisipasi secara *online* oleh Survei *e-Government PBB*.

Membangun pusat kerjasama e-government di Indonesia

Penerapan *e-government* sebagai salah satu program prioritas reformasi birokrasi sebagai upaya nyata dari Kementerian PANRB untuk mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden Joko Widodo yakni membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam hal ini, EGCC (*E-Government Cooperation Center*) memiliki peran strategis untuk mendorong keberhasilan pelaksanaan semua kegiatan kerja sama, untuk dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan serta untuk mendiskusikan langkah-langkah implementasi *e-government*. Pemerintah Indonesia menerima manfaat yang sangat besar dari EGCC ini untuk melakukan akselerasi penerapan *e-government* di Indonesia. Pusat kerja sama yang dibentuk pada Maret 2016 ini, telah menghasilkan *e-government roadmap* untuk Indonesia, perencanaan *integrated information sharing*, *standardisasi electronic document*, dan *e-government evaluation method* untuk mengukur indeks pembangunan *e-government*.

Hasil-hasil tersebut telah diimplementasikan ke dalam kebijakan Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), rencana induk SPBE, standardisasi arsip elektronik, dan pelaksanaan evaluasi SPBE di semua instansi pemerintah. EGCC di tahun 2018 sedang melaksanakan proyek kerja sama untuk penyusunan model referensi undang-undang *e-government* dan penyusunan *prototype e-government architecture*. Indonesia telah membangun rencana induk SPBE 2018 – 2025 untuk mencapai visi penyelenggaraan SPBE yang terintegrasi di semua instansi pemerintah.

Integrasi SPBE ini dapat dicapai melalui pembangunan dan penerapan Arsitektur SPBE di instansi pemerintah seperti yang telah dilakukan oleh *Ministry of The Interior and Safety (MOIS)* sehingga menghasilkan pelayanan publik yang terintegrasi dan mencapai nilai indeks layanan *online (on-line service index)* tertinggi di dunia. EGCC telah mendapatkan penghargaan sebagai *outstanding projects oleh Official Development Assistant (ODA)* Korea. Memperdalam dan mengembangkan kerjasama di bidang *e-government* melalui pembentukan dan pengoperasian Pusat

Kerjasama *e-government* (EGCC). Forum ini merupakan tindak lanjut dari MoU tentang pembentukan Komite Bersama untuk Kerjasama bidang *E-Government* dan Reformasi Birokrasi antara Menteri PANRB dengan Menteri MOGAHA (*Ministry of Government Administration and Home Affairs*) Republik Korea, yang ditandatangani di Busan, Korea, 11 Desember 2014. MoU tersebut bertujuan untuk mengkoordinasikan, menjajaki bidang kerjasama baru yang memungkinkan, serta memperluas dan memperdalam hubungan bilateral pada bidang tersebut. Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi mengatakan, pihaknya berharap agar *The 2nd Joint Commite Meeting* ini dapat memberi hasil-hasil penting dan bermanfaat untuk mendukung agenda reformasi birokrasi di Indonesia dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, efektif dan efisien. Salah satu hasil penting dari forum ini adalah penandatanganan MoU untuk kerjasama dalam pembentukan dan pengoperasian *E-Government Cooperation Center* (EGCC).

Dengan terbentuknya EGCC, maka kedua negara dapat berbagi pengalaman dan mendiskusikan langkah-langkah untuk meningkatkan kerjasama praktis dalam bidang *e-government* dan reformasi birokrasi. EGCC juga memungkinkan kedua belah pihak mengembangkan berbagai bentuk kerjasama dalam berbagai hal. Ruang lingkup kerjasama ini meliputi tiga hal. Pertama, pengembangan proyek bersama seperti penyusunan *master plan e-government* Indonesia, kegiatan peningkatan kapasitas terkait *e-government*, seperti pertukaran pengetahuan dan personil, serta konsultasi kebijakan dalam membangun *e-government*, serta dalam hal penyusunan peraturan perundang-undangan dan kelembagaan. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, kerjasama bidang reformasi birokrasi antara Indonesia dan Korea tidak terbatas di bidang *e-government* saja.

Pengembangan Sistem E-Government di Indonesia

Pelaksanaan *e-government* di Indonesia diwujudkan dengan diterbitkannya instruksi presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* yang memuat langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi serta kewenangan masing-masing guna terlaksananya pengembangan *e-government* secara nasional dengan berpedoman pada Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*, dan merumuskan rencana tindak di lingkungan instansi masing-masing. Untuk keberhasilan program *e-government* agar penyebarannya berhasil, Pemerintah Indonesia telah meluncurkan *roadmap* dimana arah kebijakan dan strategi dalam meningkatkan sistem *e-government* telah mengembangkan lima tahapan *roadmap*.

Roadmap e-government kali ini sudah mengacu kepada nilai-nilai strategis dari Nawacita, dimana fokus pembangunan pemerintah saat ini, konsep dari tim rumah transisi, dan prioritas-prioritas Presiden. Karena untuk menyelesaikan atau mengimplementasikan suatu *roadmap e-government* yang menyeluruh, yaitu yang berwujud “*digital society*” suatu negara akan membutuhkan 15 sampai 20 tahun, maka fokus *e-government* saat ini adalah program jangka pendek yaitu target 2016-2019. Dalam program jangka pendek tahun 2016 ini juga akan ditentukan program “*quick wins*”. Wujud nyata dari aplikasi *e-government* yang telah umum dilaksanakan dan diatur pelaksanaannya adalah pembuatan situs web pemerintah daerah. Situs web pemerintah daerah merupakan salah satu strategi didalam melaksanakan pengembangan *e-government* secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur.

Situs web pemerintah daerah merupakan tingkat pertama dalam pengembangan *e-government* di Indonesia yang memiliki sasaran agar masyarakat Indonesia dapat dengan mudah memperoleh akses kepada informasi dan layanan pemerintah daerah, serta ikut berpartisipasi di dalam pengembangan demokrasi di Indonesia dengan menggunakan media internet.

Manfaat Indonesia dalam Kerjasama E-Government dengan Korea Selatan

1. Terbentuknya sistem *Good Governance*

Dengan terus melakukan berbagai inovasi yang dilakukan Indonesia dan Korea Selatan maka terdapat beberapa peluang dengan diterapkannya *e-government* di Indonesia, berikut beberapa di antaranya adalah (Penerapan *E-Government* Dapat Tingkatkan Efektivitas Pelayanan Publik.

a. Meningkatkan efektifitas, efisiensi dan mengurangi biaya

Dengan menerapkan *e-government* diketahui adanya pengaturan pemanfaatan aplikasi umum berbagai pakai dan penggunaan kode sumber terbuka (*open source*) dalam pembangunannya. Dukungan teknologi layanan berbagi pakai akan mendorong kinerja administrasi pemerintah.

b. Meningkatkan Pelayanan

Layanan publik yang fokus pada pengguna layanan merupakan inti dari reformasi pelayanan publik saat ini. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pengguna layanan maka harus dilakukan integrasi *e-government* antar lembaga pemerintahan baik di tingkat pusat ataupun daerah. Dengan adanya integrasi maka pengguna layanan dapat mengakses satu situs untuk seluruh jenis layanan yang dibutuhkan oleh pengguna layanan. Pada prinsipnya inovasi *e-government* adalah untuk meningkatkan kualitas proses pelayanan dari lembaga pemerintah kepada masyarakat.

c. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Semua warga masyarakat mempunyai hak untuk berpendapat dan dengan menerapkan *e-government* maka masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan saran dan masukan dalam rangka peningkatan pelayanan pemerintah. Selain daripada itu, partisipasi masyarakat dalam *e-government* juga dapat berkembang menjadi *e-democracy* dimana masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung melalui media *online* untuk memilih para pejabat yang duduk di pemerintahan.

d. Meningkatkan Transparansi dan Mengurangi Korupsi

Dengan menerapkan *e-government* maka masyarakat dapat mengakses segala informasi tentang pemerintah yang dipublikasikan melalui *website* seperti publikasi rapat, anggaran dan pengeluaran, dan lainnya. Semua pihak yang terlibat harus berkerja dengan sungguh-sungguh agar sistem yang direncanakan dapat diterapkan dengan benar. Sehingga pada target selanjutnya dapat menghasilkan pengembangan mekanisme melalui kerjasama EGCC, dimana terciptanya manajemen pemerintah yang terintegrasi hal ini sesuai dengan Intruksi Presiden Joko Widodo yang menginginkan integrasi sehingga pengelolaan administrasi lebih efektif, efisien dan produktif.

Meningkatkan Pelayanan Publik di Indonesia

Mengacu pada Inpres Nomor 3 Tahun 2003 maka pengembangan *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan *e-government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI).

Masyarakat mengharapkan layanan publik yang terintegrasi tidak tersekat-sekat oleh batasan organisasi dan kewenangan birokrasi. Dunia usaha memerlukan informasi dan dukungan interaktif dari pemerintah untuk dapat menjawab perubahan pasar dan tantangan persaingan global secara cepat. Kelancaran arus informasi untuk menunjang hubungan dengan lembaga-lembaga negara, serta untuk menstimulasi partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam pembentukan kebijakan negara yang baik.

Integrasi sistem *e-government* ini merupakan salah satu strategi dasar yang perlu direalisasikan melalui kebijakan pemerintah. Jika ini dapat diwujudkan, maka pelaksanaan ini jelas memberi dampak kepada pemerintah daerah, terutama dalam melaksanakan layanan publik. Misalnya, dalam konteks masyarakat, dampak yang ditimbulkan adalah berlangsungnya perubahan budaya masyarakat ke penggunaan sistem yang konvensional ke sistem digital. Begitu juga dengan pegawai pemerintah, dampak ini juga mengubah budaya kerja dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Hal yang paling mendasar dalam transformasi *e-government* ini adalah kesiapan aparatur pemerintah dan budaya masyarakat yang dapat merespon perubahan ini. Tantangan pertama dari transformasi penyelenggaraan pemerintahan konvensional ke *e-government* adalah perubahan budaya organisasi. Budaya organisasi terkait dengan sistem organisasi yang dipahami dan diamalkan bersama oleh setiap anggota organisasi. Dalam hal ini, unit pemerintahan, khususnya anggota unit pemerintahan yang dikenal dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) akan memahami dan mengamalkan sistem organisasi yang baru, yaitu untuk bergerak menciptakan layanan kepegawaian berbasis digital (ASN Harus Ciptakan Layanan Kepegawaian Berbasis Digital).

Oleh karena itu, pelayanan publik harus transparan, terpercaya serta terjangkau oleh masyarakat luas melalui jaringan komunikasi dan informasi yang didukung dengan tenaga ahli yang profesional. Sumber Daya Manusia (SDM) baik sebagai pengembang, pengelola maupun pengguna *e-government* merupakan faktor yang turut menentukan bahkan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan dan pengembangan *e-government*.

Untuk itu, perlu upaya peningkatan kapasitas SDM dan penataan dalam pendayagunaannya, dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan, serta pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan melalui jalur pendidikan formal dan non formal, maupun pengembangan standar kompetensi yang dibutuhkan dalam pengembangan dan implementasi *e-government*.

Penerapan *e-government* tak lepas dari perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di era transformasi digital baru yang membuka peluang inovasi TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan. Diantara teknologi masa depan yang mendorong penerapan *e-government* adalah *cloud computing* yang merupakan teknologi layanan berbagi pakai. Teknologi layanan berbagi pakai bisa diakses melalui internet untuk memberikan layanan data, aplikasi, dan infrastruktur kepada pengguna sehingga mendorong kinerja administrasi pemerintah yang semakin kolaboratif, *mobile*, dan kompetitif.

Menghadapi pesatnya ekspansi TIK dan data dalam penerapan *e-government* dibutuhkan pula pendukung lainnya yaitu *Open Source Software* (OSS) untuk mendukung tujuan efisiensi biaya. Menurut Ketua Umum Asosiasi Open Source Indonesia (AOSI) Betti Alisjahbana, terdapat dua faktor penting keberhasilan bisa diadopsi dengan cepat atau tidak dalam lingkungan pemerintahan. Pertama adalah tergantung pada pemimpin yang membuat kebijakan dan faktor kedua ialah kesiapan dimana ASN harus siap terhadap perubahan sistem *software* dari yang lama ke sistem yang lebih canggih.

Faktor keterampilan dan ketersediaan akses memiliki tingkat hubungan yang signifikan terhadap pelayanan publik. Dengan berbagai macam kondisi sosial, ekonomi dan politik, kemajuan yang telah dicapai tidak terlepas dari kinerja SDM aparat pemerintah dan digitalisasi birokrasi melalui komitmen pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan dan memperbaiki sistem birokasinya. Selain itu Kerjasama yang telah dilakukan Indonesia dan Korea Selatan sejauh ini dinilai berhasil dan masih terus berlanjut dalam berbagai bidang. Sementara itu pemerintah Indonesia terus berupaya mengejar ketertinggalannya dalam bidang *e-government*, sehingga kedepannya Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara besar lainnya yang telah sukses dalam penerapan *e-government*.

Kesimpulan

E-Government merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. *E-Government* dapat mempermudah berbagai macam pelayanan publik dan keunggulan lainnya yaitu efisien, efektif dan transparan serta masih banyak lainnya, selain itu penggunaan *e-government* kini sangat dibutuhkan bagi tiap negara di dunia termasuk di Indonesia.

Kerjasama Indonesia dan Korea Selatan dalam bidang *e-government* dimulai pada tahun 2014, kerjasama ini bermanfaat untuk mendukung agenda reformasi birokrasi dan pengembangan pelayanan publik berbasis digital. Terdapat beberapa hasil kerjasama yang telah diterapkan di Indonesia, seperti pembentukan Pusat Kerjasama *E-Government* (EGCC) dan pengembangan sistem *e-government* di Indonesia.

EGCC memiliki peran strategis untuk mendorong keberhasilan pelaksanaan semua kegiatan kerja sama, untuk dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan serta untuk mendiskusikan langkah-langkah implementasi *e-government*. Implementasi lainnya yaitu berupa pengembangan sistem *e-government* di Indonesia, hal ini diwujudkan melalui pembentukan *roadmap e-government* nasional berupa tahapan-tahapan yang sudah dicanangkan selain itu terdapat penerapan tingkatan-tingkatan pengembangan

e-government seperti persiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan. Manfaat dari kerjasama ini berupa terbentuknya sistem *good governance* yang dapat menciptakan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, manfaat lainnya ialah menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam melayani masyarakat di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

Didi Krisna. 1993. *Hubungan Bilateral dan Politik Internasional*. Jakarta: Gramedia

Perwita Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochammad Yani. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya

Internet

ASN Harus Ciptakan Layanan Kepegawaian Berbasis Digital. Terdapat di <https://ekbis.sindonews.com/read/1204073/33/asn-harus-ciptakan-layanan-kepegawaian-berbasis-digital>

Bappenas: Kemajuan Teknologi di Indonesia Rendah terdapat di <https://amp/s/tekno.tempo.co/amp/606103/bappenas-kemajuan-teknologi-di-indonesia-rendah>

Belajar *E-Government* ke Korsel. Terdapat di <http://www.nusakini.com/news/belajar-e-government-ke-korsel>

Building A World Leading E-Government in South Korea . Terdapat di <https://www.centreforpublicimpact.org/case-study/building-a-world-leading-e-government-in-south-korea>

E-Gov Bisa Tekan Korupsi. Terdapat di <https://amp/s/m.republika.co.id/amp/ofa82d8>

E-Government Bisa Hemat Separuh Biaya Negara. Terdapat di <https://m.cnnindonesia.com/teknologi/2014/11/10/175157-192-10644/e-government-bisa-hemat-sepauh-biaya-negara>

E-Government Development Index (EDGI) terdapat di <http://publicadministration.un.org/e-govkb/en-us/about/overview/e-government>.

E-Government Indonesia Masih Tertinggal terdapat di m.cnnIndonesia.com/teknologi/2014/11/10/141025-192-10586/e-government-indonesia-masih-tertinggal.

E-Government Korea Selatan Paling Bagus di Dunia terdapat di news.okezone.com/amp/2016/0302/337/1325739/menpan-rb-e-government-korea-paling-bagus-di-dunia.

Employment and Vocational Training-Employment and Labor Terdapat di <https://www.liveinkorea.kr/portal/USA/page/contents.do>

Indonesia Bekerjasama Dengan Korea-Selatan Dalam Menerapkan *E-Government*. Terdapat di amp/s/dailysosial.id/post/Indonesia-bekerjsama-dengan-korea-selatan-dalam-menerapkan-e-government

Indonesia- Korea Resmikan Kerjasama *E-Government*. Terdapat di https://kbr.id/nasional/03/2016/indonesia___korea_resmikan_kerjasama_e_government/78959.html

Indonesia- Korea Selatan Resmikan Kerjasama *E-Government*. Terdapat di https://m.kbr.id/nasional/03-2016/indonesia_korea_selatan_resmikan_e_government/78959.html

Indonesia-Korea Sepakat Bentuk Pusat Kerjasama *E-Government*. Terdapat di <https://kominfo.go.id/content/detail/5817/indonesai-korea-sepakat-bentuk-pusat-kerjasama-e-government>

Ini penyebab penerapan “ *E-Government*” di Indonesia Belum Maksimal. Terdapat di <http://amp./s/amp/amp.kompas.com/nasional/read/2016/09/1907428/ini-penyebab-penerapan-e-government-di-indonesia-belum-maksimal>

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 9 juni 2003. Terdapat di https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/326/t/instruksi2bpresiden%2bnomr%2b3%2btahun%2b%2b2003

Penerapan *E-Government* Dapat Tingkatkan Efektivitas Pelayanan Publik. Terdapat di <https://tangerangonline.id/2018/11/24/penerapan-e-government-dapat-tingkatkan-efektivitas-pelayanan-publik>

Penerapan Sistem *E-Government* di Indonesia. Terdapat di <https://www.goodnewsfromindoneisa.id/2018/01/23/penerapan-sistem-e-government-di-indonesia>

Perizinan Mudah dan Praktis Melalui “*Surabaya Single Window*” Terdapat di <https://jatim.antaranews.com/berita/119309/perizinan-mudah-dan-praktis-melalui-surabaya-single-window>

Kemajuan E-Government Pada Korea Selatan Serta Perbandingannya dengan Indonesia terdapat di <http://eriyantovetanusi.binusian.org/files/2014/04/ERIYANTO-VETANUSI-06-PKM-UTS-TOTOLAN.docx>

Transfer Teknologi Yang Diminta Korea Selatan Sebenarnya Rahasia. Terdapat di <http://jakaratagreater.com/59046-2/>

UN *E-Government Survey* 2016. Terdapat di <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/reports/UN/E-Government-Survey-2016>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil. Terdapat di <http://lldikti12.ristekdikti.go.id/2014/01/23/undang-undangan-nomor-5-tahun-2015-tentang-aparatur--sipil-negara.html>

Website DPMPPTSP Prov Kaltim.Terdapat di <https://dpmpptsp.kaltimprov.go.id/index.php/home/>

What Is E-Governance? What Are The Types Of E-Governance?. Terdapat di <https://ictframe.com/what-is-e-governance-what-are-the-types-is-the-type-e-governance>

What Is Good Governance. Terdapat di <http://creativelearning.org/blog/2016/11/08/what-is-good-governance>

Wujudkan ASN Berwawasan Global, CEO Swasta Turut Menjadi Tenaga Pengajar. Terdapat di <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/wujudkan-asn-berwawasan-global-ceo-swasta-turut-menjadi-tenaga-pengajar>